

BAB II
GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN SITUASI ANAK
KABUPATEN REMBANG

2.1. GAMBARAN UMUM WILAYAH

2.1.1. Topografi dan Demografi

Kabupaten Rembang terletak di ujung timur Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur. Secara astronomis Kabupaten Rembang terletak pada posisi lintang berada pada 111°00' - 111°30' BT dan 6°30' - 7°00' LS. Batas-batas administratif wilayah Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Timur : Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur

Sebelah Barat : Kabupaten Pati

Sebelah Selatan : Kabupaten Blora

Kabupaten Rembang memiliki luas wilayah 101.408 ha yang terbagi menjadi 14 kecamatan, 287 desa dan 7 kelurahan. Kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Sale (10.714 ha) disusul Kecamatan Bulu (10.240 ha). Sebagian besar wilayah Kabupaten Rembang berupa tanah kering lahan bukan sawah 72.313 ha dan yang lain berupa lahan sawah 29.095 ha. Penggunaan tanah kering umumnya adalah untuk perkebunan sedangkan lahan sawah lebih banyak dipergunakan untuk pertanian dengan jenis pengairan teknis 2.210 ha (7,58%), pengairan 1/2 teknis 3.594 ha (12,32%), pengairan sederhana 2.569 ha (8,81%) dan tadah hujan 20.722 ha (71,29%).

Secara topografis, Kabupaten Rembang memiliki karakteristik wilayah yang bervariasi antara lain meliputi daerah pantai, dataran rendah, dataran tinggi dan daerah pegunungan. Wilayah Kabupaten Rembang 8,34% terletak pada ketinggian 1-7 meter dpl, ketinggian 7-25 m dpl sebesar 12,41% , ketinggian 25-100 m dpl sebesar 42,82 % , ketinggian 100-500 m dpl sebesar 28,08%, dan ketinggian diatas 500 m dpl sebesar 8,34%. Data luas wilayah kecamatan di Kabupaten Rembang dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1**Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Rembang Tahun 2014**

No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (ha)
1	Sumber	7.673
2	Bulu	10.240
3	Gunem	8.020
4	Sale	10.714
5	Sarang	9.133
6	Sedan	7.964
7	Pamotan	8.156
8	Sulang	8.454
9	Kaliori	6.150
10	Rembang	5.881
11	Pancur	4.594
12	Kragan	6.166
13	Sluke	3.759
14	Lasem	4.504
	Jumlah	101.408

Sumber : Kabupaten Rembang Dalam Angka. 2015

Jenis iklim yang ada di Kabupaten Rembang adalah iklim tropis dengan suhu rata-rata sebesar 23°C, sedangkan suhu maksimum dapat mencapai 33°C. Di wilayah Kabupaten Rembang curah hujan rata-rata 1.179,86 mm per tahun dimana curah hujan tertinggi terjadi bulan Desember yaitu sebanyak 197 mm/bulan dan curah hujan terendah terjadi bulan Agustus dan September yaitu sebanyak 10 dan 17 mm/bulan.

Kabupaten Rembang memiliki sumber air permukaan berupa sungai dan dam. Sungai yang melewati wilayah Kabupaten Rembang antara lain sungai Randugunting, Babagan, Karanggeneng, Kening, Telas, Kalipang, Sudo dan Sungai Patiyan. Di Kabupaten Rembang terdapat 121 dam dan 25 daerah irigasi, dari jumlah tersebut tidak semuanya dialiri air sepanjang tahun. Kawasan rawan bencana di Kabupaten Rembang meliputi kawasan rawan bencana banjir, kawasan

rawan bencana tanah longsor, kawasan rawan bencana kekeringan dan rawan bencana angin topan. Persebaran lokasi rawan bencana secara umum merata di seluruh wilayah Kabupaten Rembang.

Kondisi Demografi Kabupaten Rembang pada tahun 2014 seperti tersaji pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Demografi Kabupaten Rembang Tahun 2013

URAIAN	JUMLAH
Jumlah Penduduk	611.495
Seks Rasio	99,36 %
Tingkat Kepadatan penduduk	603 jiwa/ km ²
Laju pertumbuhan penduduk	0,91%
Jml anak usia 0-4 tahun	47.104
Jml anak usia 5-6 tahun	19.150
Jml anak usia 7-12 tahun	59.313
Jml anak usia 13-15 tahun	30.722
Jml anak usia 16-18 tahun	31.131

Sumber : BPS Kab Rembang Tahun 2014

Dari data tabel diatas menunjukkan bahwa penduduk perempuan di Kabupaten Rembang lebih banyak daripada penduduk laki-laki, ditunjukkan dengan seks rasio 99,36 %, yakni dari 10.000 penduduk perempuan, terdapat 9.936 penduduk laki- laki.

2.1.2. Penduduk Miskin dan Pengangguran

Berdasarkan data jumlah penduduk miskin yang ada sampai dengan tahun 2014 cenderung menurun, dimana pada tahun 2012 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Rembang sebesar 129.920 jiwa atau sebesar 21,88 % turun menjadi sebesar 128.000 jiwa (20,97%) pada tahun 2013 serta kembali turun menjadi 119.988 jiwa (19,50%) pada tahun 2014. Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat dinamis, mengingat faktor eksternal yang berpengaruh terhadap kemampuan belanja masyarakat juga bergerak dinamis disamping berbagai faktor internal yang mempengaruhi daya tahan masyarakat

terhadap gejolak ekonomi yang terjadi. Apabila dilihat dari data lima tahun terakhir, tingkat kemiskinan di Kabupaten Rembang mempunyai kecenderungan yang tidak stabil namun kecenderungannya menurun. Kenaikan jumlah penduduk miskin di tahun 2011 dibandingkan tahun sebelumnya diakibatkan karena kondisi perekonomian nasional maupun daerah yang tidak stabil. Perkembangan angka tingkat pengangguran terbuka di kabupaten Rembang menunjukkan kenaikan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3
Data Penduduk Miskin dan Tingkat Pengangguran Terbuka
di Kabupaten Rembang Tahun 2010-2014

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah Penduduk Miskin	138.569	140.377	129.900	128.000	119.988
Persentase Jumlah Penduduk Miskin %	23,41	23,71	21,88	20,97	19,50
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,89	5,92	5,80	5,98	5,23

Sumber: Rembang dalam angka, 2015

Pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor yang terjadi pada tahun 2010-2014 mendorong terciptanya lapangan kerja baru. Idealnya pertumbuhan lapangan kerja baru dapat lebih tinggi dari pertumbuhan angkatan kerja, sehingga tingkat pengangguran akan berkurang setiap tahunnya. Pada tahun 2014 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Rembang sebesar 5,23 % menurun dibanding tahun 2013 sebesar 5,98%. Pengangguran merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan kemandirian Kabupaten Rembang. Angkatan kerja Kabupaten Rembang yang pada umumnya tenaga kerja non formal dan kurang terdidik, rendahnya minat generasi muda bekerja dibidang

pertanian merupakan penyebab utama terjadinya pengangguran di Kabupaten Rembang yang terus membutuhkan perhatian khusus dari Pemerintah Daerah.

Dalam jangka panjang, Pemerintah Kabupaten Rembang telah memformulasi kebijakan dan berkomitmen penuh bahwa pembangunan sumber daya manusia merupakan kunci utama bagi pengentasan persoalan pengangguran yang perlu terus ditangani melalui perbaikan kualitas pendidikan. Selain itu peningkatan kapasitas, kualitas, produktifitas dan daya saing angkatan kerja perlu terus dipacu agar menghasilkan tenaga kerja yang handal, terlatih dan siap bersaing serta mampu menciptakan lapangan kerja baru ditengah-tengah masyarakat.

2.1.3. IPG dan IDG

Besarnya IPG Kabupaten Rembang terus mengalami kenaikan, pada tahun 2012 sebesar 85,57 meningkat menjadi 85,72 pada tahun 2013 dan 86,04 pada tahun 2014. Peningkatan IPG terutama didukung oleh meningkatnya tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan perempuan serta sumbangan perempuan dalam ekonomi rumah tangga. Berbeda dengan IPG, besarnya nilai IDG Kabupaten Rembang mengalami fluktuatif, pada tahun 2011 IDG Kabupaten Rembang sebesar 69,97 menaik di tahun 2012 menjadi 69,98 dan kembali menurun 0,71 % di tahun 2013 menjadi sebesar 69,27. Pada tahun 2014 IDG kembali menurun 2,84% menjadi 66,43. Menurunnya nilai IDG Kabupaten Rembang mungkin dikarenakan menurunnya jumlah tenaga kerja perempuan, jumlah perempuan yang bekerja pada posisi puncak (manajer) dan keterlibatan perempuan di parlemen serta sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja. Besarnya nilai IPG dan IDG Kabupaten Rembang selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4**Capaian IPG dan IDG Kabupaten Rembang Tahun 2011-2014**

No	Indeks	2011	2012	2013	2014
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	85,12	85,57	85,72	86,04
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	69,97	69,98	69,27	66,43

Sumber : BPS Kabupaten Rembang, 2015

2.1.4. Pendidikan

Tingkat pemerataan dan perluasan akses pembangunan pendidikan dapat dilihat melalui indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Begitu pula dengan APM, semakin tinggi APM berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah pada tingkat pendidikan tertentu. APK untuk semua jenjang pendidikan pada kurun waktu 2011–2014 menunjukkan kecenderungan meningkat. Secara rinci perkembangan APK semua jenjang pendidikan terlihat pada tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5**Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Rembang Tahun 2011 - 2014**

No	APK	2011(%)	2012(%)	2013(%)	2014(%)
1	PAUD	49,30	49,68	47,40	51,9
2	SD/MI	98,10	99,67	99,68	101,28
3	SMP/MTs	96,91	96,98	96,99	101,12
4	SMA/SMK/MA	64,93	65,86	66,62	73,31

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun 2014

Angka partisipasi kasar (APK) pada semua jenjang pendidikan mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) mengalami peningkatan. Meskipun demikian, beberapa masalah yang masih perlu mendapat perhatian, antara lain menyangkut masih rendahnya kesadaran orang tua untuk memasukkan anak khususnya usia 0-4 di lembaga PAUD, serta anak-anak yang tidak melanjutkan jenjang pendidikan menengah atas.

APM mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu, yang dibagi dalam tiga kelompok jenjang pendidikan yaitu SD untuk penduduk usia 7-12 tahun, SMP untuk penduduk usia 13-15 tahun, dan SMA untuk penduduk usia 16-18 tahun. Secara umum capaian APM periode tahun 2011-2014 menunjukkan peningkatan di semua jenjang pendidikan seperti tersaji pada tabel 2.6 berikut:

Tabel 2.6
Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan
Di Kabupaten Rembang Tahun 2011 – 2014

No	Uraian	2011	2012	2013	2014
1	APM SD/Mi (%)	90,75	90,97	86,39	87,41
2	APM SMP/MTs (%)	66,91	67,06	72,2	77,26
3	APM SMA/SMK/MA (%)	41,42	44,44	44,30	45,05

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun 2014.

Dari tabel diatas terlihat APM SMP/MTS serta APM SMA/SMK/MA belum menunjukkan angka yang optimal. Oleh karena itu akses layanan pendidikan dasar terutama SMP/MTs harus selalu diperbaiki terutama untuk mendekatkan akses layanan pendidikan dasar agar mudah dijangkau, kebijakan sekolah gratis dan bermutu untuk SD-SMP agar tingkat partisipasi pada pendidikan dasar dapat meningkat, demikian pula layanan pendidikan menengah bagi siswa dari keluarga miskin.

Seperti halnya APK/APM, angka kelulusan pada tahun 2014 disemua jenjang pendidikan juga mengalami peningkatan. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang, pada tahun 2014 angka kelulusan siswa di Kabupaten Rembang untuk tingkat SD/MI hampir mencapai 100%, sedangkan angka kelulusan tingkat SMP/MTs mencapai angka 99,38 % dan tingkat SMA/SMK/MA mencapai 99,76%. Berikut pada tabel 2.7 perkembangan angka kelulusan pada masing-masing jenjang pendidikan di Kabupaten Rembang tahun 2011-2014.

Tabel 2.7
Angka Kelulusan Masing-masing jenjang Pendidikan
Di Kabupaten Rembang 2011 - 2014

Uraian	2011	2012	2013	2014
1. Angka Kelulusan SD/MI (%)	99,99	99,99	100	100
2. Angka Kelulusan SMP/MTs (%)	97,96	99,02	99,01	99,39
3. Angka Kelulusan SMA/SMK/MA (%)	92,31	96,77	99,90	99,76

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun 2014.

Angka transisi atau angka melanjutkan pada tahun 2014 untuk jenjang pendidikan SMP dan SMA menunjukkan peningkatan, bahkan mencapai angka diatas 100%, hal ini bisa terjadi karena terdapat murid lulusan SD dari kabupaten lain yang bersekolah di Kabupaten Rembang, misalnya Kabupaten Pati. Secara rinci perkembangan Angka Transisi (AT) tersaji pada tabel 2.8 berikut:

Tabel 2.8
Angka Transisi SMP dan SMA Tahun 2010 - 2014

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1. Angka Transisi ke SMP (%)	102,06	101,39	102,81	101,57	102,85
2. Angka Transisi Ke SMA/MA/SMK (%)	81,67	78,06	82,84	82,87	90,03

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun 2014

Angka putus sekolah di Kabupaten Rembang termasuk kategori rendah mulai tingkat SD/MI hingga menengah atas, seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan serta adanya kebijakan program sekolah gratis di Kabupaten Rembang. Meskipun demikian pelaksanaan program sekolah gratis masih harus terus dievaluasi karena masih belum maksimalnya capaian Angka Transisi (AT) khususnya Angka Transisi ke jenjang pendidikan SMP sederajat. Berikut tabel 2.9 Angka Putus Sekolah jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA Kabupaten Rembang Tahun 2010 – 2014.

Tabel 2.9
Angka Putus Sekolah Jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA
Kabupaten Rembang Tahun 2010 – 2014

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1. Angka Putus Sekolah SD/MI (%)	0,04	0,03	0,03	0,03	0,014
2. Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%)	0,19	0,18	0,16	0,16	0,11
3. Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA (%)	0,42	0,41	0,38	0,37	0,27

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun 2014

Sarana dan prasarana penunjang pembelajaran di semua jenjang pendidikan memiliki nilai strategis dalam layanan peningkatan mutu pendidikan. Sekolah yang memiliki perpustakaan dan laboratorium standar di Kabupaten Rembang terlihat pada tabel 2.10 berikut:

Tabel 2.10
Persentase SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA yang Memiliki
Sarana Pendukung Pembelajaran di Kabupaten Rembang
Tahun 2010 - 2014

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
Persentase SD/MI yang memiliki sarana perpustakaan standar (%)	29,78	44,20	54,32	54,57	80,34
Persentase SMP/MTs yang memiliki perpustakaan standar (%)	68,17	68,17	78,72	73,68	71,88
Persentase SMP/MTs yang memiliki lab computer (%)	12,09	12,09	13,83	8,42	22,92

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun 2014

Tabel di atas menunjukkan bahwa belum banyak SD yang memiliki perpustakaan standar. Pada tahun 2014, jumlah SD yang memiliki perpustakaan standar sudah mencapai 80,34%. Sedangkan di tingkat SMP sudah cukup banyak SMP/MTs yang memiliki perpustakaan standard yaitu sebesar 71,88%, meskipun untuk laboratorium komputer masih dibawah 22,92%. Terkait dengan tatakelola dan pencitraan publik penyelenggaraan pendidikan dapat dilihat dari persentase sekolah yang telah melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) secara optimal. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah model manajemen yang memberikan otonomi lebih ke sekolah-sekolah dan meningkatkan keterlibatan langsung dari komunitas sekolah (kepala sekolah, guru, mahasiswa, staf, orang tua dan masyarakat) dalam pengambilan keputusan guna meningkatkan kualitas sekolah. Persentase SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA yang melaksanakan MBS di Kabupaten Rembang 2010 - 2014 secara rinci tersaji pada tabel 2.11 berikut :

Tabel 2.11
Persentase SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA
yang melaksanakan MBS di Kabupaten Rembang 2010–2014

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1. Persentase SD/MI melaksanakan MBS (%)	100	100	100	100	100
2. Persentase SMP/MTs melaksanakan MBS(%)	100	100	100	100	100
3. Persentase SMA/SMK/MA melaksanakan MBS (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun 2014

2.1.5. Kesehatan

Pada tahun 2014 status gizi balita menunjukkan adanya penurunan. Jumlah Balita Gizi Buruk terjadi peningkatan yang semula dari 21 balita pada tahun 2013 menjadi 30 balita pada tahun 2014. Status gizi balita adalah keadaan tubuh yang merupakan hasil akhir dari keseimbangan antara zat gizi yang masuk ke dalam tubuh dan utilisasinya. Status balita gizi kurang mengalami penurunan dari 3.432 pada tahun 2013 menjadi 3.431 pada tahun 2014 dan status balita gizi lebih mengalami penurunan dari 195 pada tahun 2013 menjadi 162 tahun 2014. Adapun perkembangan Status Gizi Balita (PSG) di Posyandu secara rinci dijelaskan oleh tabel 2.12 sebagai berikut:

Tabel 2.12
Perkembangan Status Gizi Balita Tahun 2010 - 2014







No	Status Gizi Balita	2010	2011	2012	2013	2014
1	Balita Gizi Buruk (kasus)	374	301	364	289	330
2	Balita Gizi Kurang (kasus)	3.867	3.654	3.461	3.432	3.431
3	Balita Gizi Baik (kasus)	29.716	31.453	31.427	32.088	32.279











No	Status Gizi Balita	2010	2011	2012	2013	2014
4	Balita Gizi Lebih (kasus)	217	204	232	195	162
	Jumlah Balita yang ditimbang	34.174	35.616	35.402	35.934	36.121







Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang Tahun 2014

Adapun pencapaian Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Rembang ditunjukkan oleh tabel 2.13 sebagai berikut :

Tabel 2.13
Hasil Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
Kabupaten Rembang tahun 2014

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN			TARGET	Tercapai / Blm
		Sasaran	Realisasi	Hasil %		
1	2	3	4	5	6	7
A	Pelayanan Kesehatan Dasar					
	1. Cakupan kunjungan ibu hamil (K4)	10.029	8.581	85,56	91,00	 Blm Tercapai
	2. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	1.495	1.495	100,00	75,00	 Tercapai
	3. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	9.573	9.028	94,31	95,00	 Blm Tercapai
	4. Cakupan pelayanan nifas	9.573	8.699	90,87	95,00	 Blm Tercapai
	5. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	702	702	100,00	75,00	 Tercapai
	6. Cakupan kunjungan bayi	9.117	8.624	94,59	85,00	 Tercapai

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN			TARGET	Tercapai / Blm
		Sasaran	Realisasi	Hasil %		
1	2	3	4	5	6	7
	7. Cakupan desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	294	294	100,00	95,00	 Tercapai
	8. Cakupan pelayanan anak balita	34.571	33.043	95,58	80,00	 Tercapai
	9. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin	3.094	3.094	100,00	100,00	 Tercapai
	10. Balita gizi buruk mendapat perawatan (BB/TB)	30	30	100,00	100,00	 Tercapai
	11. Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	9.650	9.650	100,00	90,00	 Tercapai
	12. Cakupan peserta KB aktif	131.056	109.666	83,68	80,00	 Tercapai
	13. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit					
	a. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk	160.361	1	0,62	> 2 /100rb	 Belum Tercapai
	b. Penemuan Penderita Pneumonia Balita per jml perkiraan penderita	5.229	16	0,31	50,00	 Sulit Tercapai
	c. Penemuan dan pengobatan pasien baru TB BTA positif (CDR)	652	433	66,4	65,00	 Tercapai
	d. Penderita DBD yang ditangani	198	198	100,00	100,00	 Tercapai

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN			TARGET	Tercapai / Blm
		Sasaran	Realisasi	Hasil %		
1	2	3	4	5	6	7
	e. Penemuan dan penanganan penderita diare	6.358	6.358	100,00	90,00	 Tercapai
	14. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masy miskin	236.878	236.878	100,00	100,00	 Tercapai
B	Pelayanan Kesehatan Rujukan					
	1. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan maskin	6.198	6.198	100,00	100,00	 Tercapai
	2. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di kab.	2	2	100 %	100,00	 Tercapai
C	Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa / KLB					
	17. Cakupan desa/ klrhan mengalami KLB yg dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jm	5	5	100 %	100 %	 Tercapai
D	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat					
	18. Cakupan desa siaga aktif	294	294	100 %	70,00	 Tercapai

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang Tahun 2014

Pada tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2014 dari semua indikator SPM Bidang Kesehatan sebanyak 22 Indikator, yang telah tercapai sebanyak 17 indikator (77,27 %), dan yang belum tercapai sebanyak 5 indikator (22,73 %). Dari 5 indikator SPM yang belum tercapai dikarenakan beberapa kendala teknis diantaranya :

- a. Penentuan jumlah sasaran pada indikator pelayanan kesehatan dasar yang terlalu tinggi sehingga apabila dibandingkan dengan hasil pendataan akan sangat berpengaruh terhadap nilai cakupannya. Contohnya adalah cakupan pertolongan persalinan, cakupan kunjungan ibu hamil K4.
- b. Tata cara penghitungan rumus indikator, dimana disebutkan bahwa denominatornya adalah perkiraan jumlah penduduk untuk indikator penemuan penderita pneumonia.

Adapun beberapa indikator yang belum tercapai adalah :

1. Cakupan kunjungan ibu hamil K4
2. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan .
3. Cakupan pelayanan nifas.
4. Cakupan penemuan dan penanganan AFP rate .
5. Penemuan penderita pneumonia balita.

Untuk melihat Rekapitulasi Indikator SPM yang telah tercapai maupun yang belum tercapai pada tabel 2.14 sebagai berikut :

Tabel 2.14

Rekapitulasi Pencapaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Rembang tahun 2014

No	Jenis Pelayanan	Jml Indikator	PENCAPAIAN	
			Tercapai	Belum
I	Pelayanan Kesehatan Dasar	18	13	5
II.	Pelayanan kesehatan Rujukan	2	2	0
III	Penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan KLB	1	1	0
IV.	Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	1	1	0
	Jumlah	22	17 (77,27 %)	5 (22,73 %)

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang Tahun 2014

Tabel 2.14 menunjukkan bahwa persentase indikator SPM Bidang Kesehatan pada tahun 2014 yang telah tercapai sebesar 77,27 % (17 indikator) dan yang belum tercapai sebesar 22,73 % (5 indikator).

Di bidang pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas hidup masyarakat sangat dipengaruhi oleh kualitas sarana dan prasarana kesehatan. Pelayanan kesehatan dasar dilayani puskesmas, sedangkan pelayanan kesehatan rujukan dilayani rumah sakit. Sampai dengan tahun 2014 jumlah puskesmas di Kabupaten Rembang sebanyak 16 unit dengan semua puskesmas sudah merupakan puskesmas rawat inap, puskesmas 16 unit dan PKD (Pos Kesehatan Desa) sebanyak 166 unit. Dari segi jumlah, untuk pelayanan puskesmas sudah cukup memadai, namun dari segi kualitas masih perlu ditingkatkan. Sedangkan jumlah rumah sakit 2 unit (1 milik Pemerintah Daerah dan 1 Rumah Sakit Islam Arofah), pondok bersalin 2 unit, balai pengobatan 6 unit, dan praktek dokter swasta 171 unit.

Perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat Kabupaten Rembang secara keseluruhan mengalami peningkatan, hal ini ditandai dengan meningkatnya persentase rumah tangga yang memiliki jamban pada tahun 2014 mencapai 57,8% sedangkan untuk persentase akses sanitasi layak mencapai 71,25%, hal ini menunjukkan bahwa perlunya peningkatan jamban sehat sebesar 13,45% di Kabupaten Rembang. Persentase rumah tangga sehat pada tahun 2014 mencapai 73,4%. Persentase institusi yang dibina kesehatan lingkungannya mencapai 58,67%, persentase rumah sehat 66,77%, persentase pengguna air sehat mencapai 59,7% sedangkan untuk akses air minum layak sebesar 70%. Persentase rumah tangga yang memiliki SPAL (Saluran Pembuangan Air Limbah) mencapai 39,65%.

2.1.6. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan Inpres No. 9 tahun 2000 adalah upaya secara terencana untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di Kabupaten Rembang. Indikator yang digunakan untuk mengukur

kesetaraan gender adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks Pembangunan Gender merupakan nilai komposit Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terpilah laki-laki dan perempuan meliputi tiga sub indikator yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, angka lama sekolah dan pendapatan.

Di Kabupaten Rembang masih terdapat kesenjangan gender dalam memperoleh akses, partisipasi dan manfaat pembangunan. Dalam hal kedudukan perempuan dalam jabatan politik pada lembaga legislatif masih rendah yaitu sebanyak 10 orang atau sekitar 22,2%, masih dibawah jumlah ketentuan peraturan perundangan yang ada sebesar 30%. Terkait dengan perlindungan anak, Kabupaten Rembang telah menetapkan kebijakan Kabupaten layak Anak dengan Pendekatan Desa Ramah Anak, hingga tahun 2014 telah ada 30 desa yang menjadi proyek percobaan Desa Ramah Anak dan 28 desa replikasi desa ramah anak. Pada Tahun 2014 telah dibuat Peraturan Daerah No 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, yang mengamanatkan bahwa semua desa harus menyelenggarakan desa ramah anak.

Dalam penanganan perempuan dan anak korban kekerasan, tabel 2.15 adalah capaian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Rembang tahun 2012-2014 berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 01 tahun 2010.

Tabel 2.15

**Matrik Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban
Kekerasan Kabupaten Rembang Tahun 2012-2014**

Uraian	Capaian Performance		
	2012	2013	2014
a. Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak,dengan indikator SPM, sbb:			
1) Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di	100	100	100

Uraian	Capaian Performance		
	2012	2013	2014
dalam unit pelayanan terpadu			
2) Cakupan ketersediaan petugas di unit pelayanan terpadu yang memiliki kemampuan untuk menindaklanjuti pengaduan/laporan masyarakat	75	75	100
b. Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan			
1) Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	100	100	100
2) Cakupan Puskesmas mampu tatalaksana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A)	100	100	100
3) Cakupan RSUD Vertikal/RSUD/RS Swasta/RS Polri yang melaksanakan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100	100	100
4) Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A) di Puskesmas	100	100	100
5) Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksanaan kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Rumah Sakit	100	100	100
c. Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan			
1) Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	58	58	70
2) Cakupan petugas rehabilitasi sosial yang terlatih	50	50	70
3) Cakupan layanan bimbingan rohani yang di berikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	65	65	75

Uraian	Capaian Performance		
	2012	2013	2014
4) Cakupan petugas bimbingan rohani terlatih dalam melakukan bimbingan rohani	100	100	100
d. Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan			
1) Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100	100	100
2) Cakupan Penyelesaian penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat kepolisian	100	100	100
3) Cakupan ketersediaan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Polres	100	100	100
4) Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana di UPPA	50	50	100
5) Cakupan ketersediaan polisi yang terlatih dalam memberikan layanan yang sensitive gender	100	100	80
6) Cakupan ketersediaan Jaksa yang terlatih dalam penuntutan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100	100	100
7) Cakupan ketersediaan hakim yang terlatih dalam menanganai perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak	100	100	100
8) Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	30	30	50
9) Cakupan ketersediaan petugas pendamping hukum atau advokat yang mempunyai kemampuan pendamping pada seksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	30	30	50
e. Pelayanan pemulihan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan			
1) Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	60	60	90

Uraian	Capaian Performance		
	2012	2013	2014
2) Cakupan ketersediaan petugas terlatih untuk melakukan rintegrasi sosial	60	60	90

Sumber : BPMPKB Kab.Rembang Tahun 2014

2.1.7. Sosial

Di bidang sosial, jumlah penyandang masalah sosial berdasarkan jenis PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang ada di Kabupaten Rembang pada tahun 2010-2014 ditunjukkan oleh table 2.16 berikut:

Tabel 2.16
Jenis PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)
Kabupaten Rembang Tahun 2010- 2014

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1	Anak Balita Terlantar	2836	1477	1486	1486	1486
2	Anak Terlantar	7890	2602	2855	2855	2855
3	Anak Nakal	584	53	179	179	179
4	Anak dengan masalah hukum	0	11	27	27	27
5	Anak Jalanan	416	262	51	51	51
6	Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	5920	3594	4050	4050	4050
7	Anak Korban tindak Kekerasan	1095	250	14	14	14
8	Lanjut Usia Terlantar	7420	4188	5554	5554	5554
9	Penyandang Cacat Anak	1261	788	941	941	942

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
10	Penyandang Cacat Dewasa	3625	2337	2558	2558	2558
11	Pengemis	135	63	57	57	57
12	Gelandangan	7	11	8	8	8
13	Korban Bencana	232	158	13	13	34
14	Penyandang HIV/Aids	0	0	2	2	2

Sumber: Dinsosnakertrans Kab. Rembang Tahun 2015

Dari tabel diatas diketahui bahwa masih banyak permasalahan anak yang perlu mendapat perhatian. Hal ini bisa dilihat dari jumlah anak balita terlantar, anak nakal dan anak yang bermasalah dengan hukum. Oleh karena itu kebijakan menuju Kabupaten Layak Anak dalam implementasinya harus selalu dioptimalkan dengan melibatkan seluruh sumberdaya terutama keluarga, masyarakat, pemerintah dan dunia usaha. Guna mendukung terselenggaranya penanganan masalah kesejahteraan sosial dan PMKS, maka diperlukan peran aktif segenap partisipasi sosial masyarakat yang tercakup dalam Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). PSKS tersebut meliputi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna (KT), Organisasi Sosial (ORSOS), Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS), Dunia Usaha serta Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM).

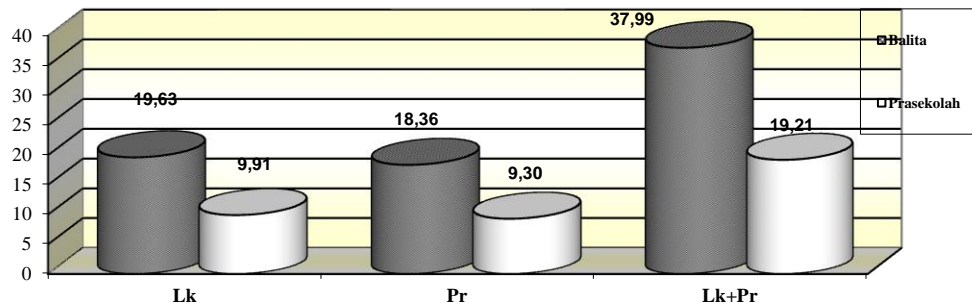
Sesuai Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 129/Huk/2008 telah ditetapkan SPM 2008 -2015 yang mengatur masalah PMKS yang menerima bantuan, pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE), panti sosial yang menyediakan sarana dan prasana, bantuan sosial bagi korban bencana, penanganan korban bencana, penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang menerima bantuan.

2.2. Struktur Penduduk Usia Anak

Secara lengkap mengenai situasi anak di Kabupaten Rembang pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :

2.2.1. Balita (12-59 Bulan) Dan Anak Pra Sekolah (60-83 Bulan)

Jumlah penduduk pada kelompok sasaran ini di Kabupaten Rembang tahun 2013 tercatat sebanyak 37.756 jiwa untuk anak balita (1-4 tahun) atau 6,17 % dan sekitar 19.209 jiwa untuk anak pra sekolah (5-6 tahun) atau 3,14 % dari jumlah penduduk yang ada dengan sex ratio di atas dibawah 100. Variasi angka yang terjadi di daerah kecamatan berkisar antara 1.599 jiwa (Kec. Gunem) dan 5.743 jiwa (Kec. Rembang) untuk anak balita sedangkan angka anak pra sekolah berkisar antara 643 jiwa (Kec. Gunem) dan 2.780 jiwa (Kec. Rembang).



Gambar 2.1 Jumlah penduduk balita dan anak prasekolah (ribuan jiwa)

Tingkat ketergantungan anak balita dan pra sekolah masih cukup tinggi karena mereka memerlukan perhatian khusus dalam proses tumbuh kembang. Faktor lingkungan baik fisik maupun sosial akan memberikan pengaruh yang kuat terhadap perkembangan anak tersebut. Konvensi hak anak (KHA) yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada Tahun 1990 mengisyaratkan bahwa anak harus diberi kondisi lingkungan yang aman dan memungkinkan anak untuk mampu melampaui tahap-tahap perkembangan secara baik.

Salah satu cara usaha agar anak dapat hidup sehat dan tumbuh sesuai apa yang diharapkan, perlu diberi vitamin maupun makanan yang cukup dan bergizi serta pemberian kekebalan (buatan) terhadap bahaya penyakit tertentu (imunisasi). Termasuk memberikan perhatian

khusus kepada mereka yang memang secara lahiriah tidak mampu (cacat) yang dirasakan selama ini masih kurang.

Pembentukan SDM-dini membutuhkan berlangsungnya proses belajar mengajar yang dilakukan secara dini, baik melalui kegiatan *play group* (PG), pendidikan pra sekolah (TK = taman kanak-kanak) maupun melalui bina keluarga balita atau BKB. Dari hasil pengamatan lapangan menunjukkan bahwa anak pra sekolah yang sempat sekolah TK mempunyai daya nalar dan intelegensi yang lebih baik serta cepat beradaptasi dengan lingkungan dibandingkan dengan mereka yang tidak pernah sekolah TK. Namun demikian, belum adanya kurikulum yang baku di tingkat pra sekolah menyebabkan kesulitan untuk menentukan kriteria penilaian hasil pendidikan TK yang baik.

Berbagai permasalahan yang bisa disimpulkan pada kelompok ini adalah tingkat tumbuh kembang anak balita rendah, dengan penyebab utama adalah :

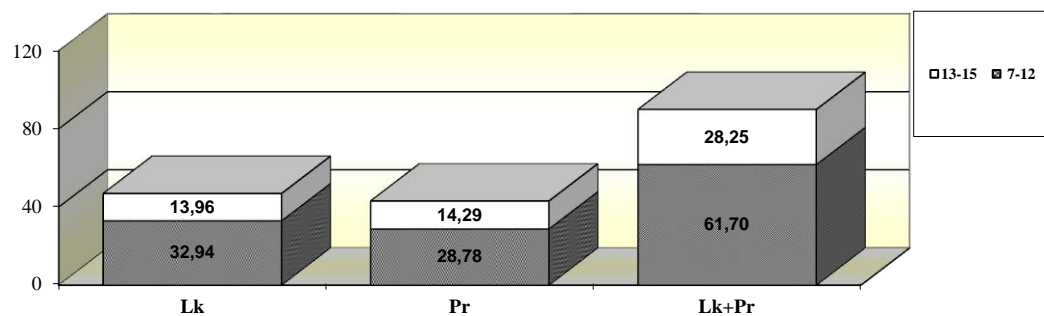
1. Status gizi dan derajat kesehatan balita yang rendah.
2. Kesehatan dan kebersihan lingkungan yang kurang baik
3. Pemberian dan pola makan yang tidak sesuai dengan standard kesehatan
4. Perhatian orang tua terhadap anak balita masih kurang
5. Tingkat pengetahuan masyarakat/keluarga akan pentingnya PHBS terbatas
6. Cakupan SAB (saluran air bersih) dan sanitasi yang masih kurang
7. Pemberian imunisasi yang tidak lengkap
8. Biaya sekolah TK yang cukup tinggi
9. Jumlah dan distribusi sekolah TK yang belum merata
10. Jumlah dan kualitas tenaga guru TK yang masih kurang.

Kondisi ini jika dibiarkan bisa berakibatkan rendahnya kualitas SDM remaja atau penduduk Kabupaten Rembang di kemudian hari, baik yang menyangkut tingkat kecerdasan maupun derajat kesehatannya. Untuk itu, perlu adanya usaha yang mengarah terciptanya suasana lingkungan yang nyaman, bersih dan sehat dengan tingkat kesadaran masyarakat yang cukup tinggi untuk memeliharanya serta didukung tingkat pengetahuan masyarakat tentang masalah

kesehatan/gizi yang cukup baik disertai dengan tersedianya fasilitas yang mudah dijangkau, baik yang menyangkut akses maupun dana yang harus disediakan.

2.2.2. Anak Usia Sekolah Atau AUS (7-15 Tahun)

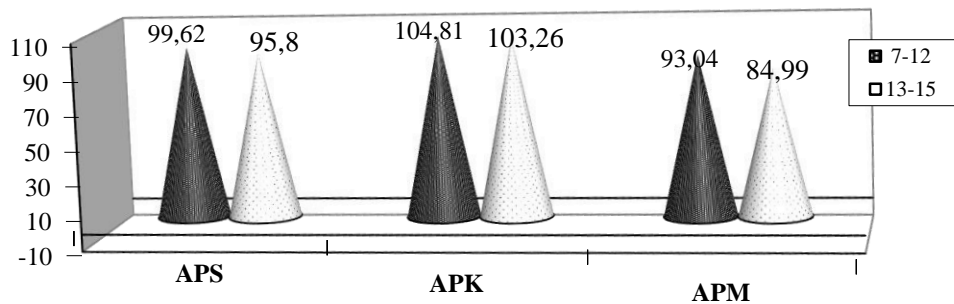
Jumlah anak usia sekolah dasar (7-12 tahun) di Kabupaten Rembang tahun 2013 tercatat sekitar 61.705 jiwa atau 10,09 % dari jumlah penduduk dengan sex ratio sebesar 114,39 per 100 anak wanita sedangkan anak usia sekolah lanjutan tingkat pertama atau SLTP (13-15 tahun) tercatat sekitar 28.249 jiwa atau 4,62 % dengan sex ratio sebesar 97,65 %. Angka tertinggi dan terendah untuk ke dua kelompok AUS terdapat di Kec.Gunem dan Kec.Rembang dengan variasi angka masing-masing antara 2.074 – 8.669 jiwa untuk usia 7-12 tahun dan 953 – 3.922 jiwa untuk usia 13-15 tahun.



Gambar 2.2 Jumlah penduduk usia 7-15 tahun (ribuan jiwa)

Bentuk perlakuan dan perhatian terhadap AUS tentunya berbeda dengan kelompok sebelumnya (balita/prasekolah), karena mereka mulai diarahkan agar bisa belajar mandiri dan dengan demikian tingkat ketergantungan mulai berkurang. Namun demikian mereka tetap memerlukan perlindungan dari segala bentuk bahaya/ancaman fisik ataupun non fisik dan dicukupi kebutuhannya. Hal ini sesuai dengan konvensi hak anak (KHA) yang memberi arahan yang jelas bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Salah satu indikator untuk mengetahui usaha peningkatan kualitas SDM mereka adalah dari sisi pendidikan dalam bentuk APS, APK dan APM AUS 7-15 tahun

berkaitan dengan pencanangan wajar diksar 9 tahun yang telah diuraikan dalam bab II pada saat membahas keadaan sosial budaya.



Gambar 2.3 APS, APK dan APM AUS 7-15 tahun

Dari bentuk gambar di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha pendidikan wajar diksar 9 tahun yang telah dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Rembang baru sebatas tingkat sekolah dasar saja yang ditunjukkan dari angka partisipasi yang mendekati 100. Namun di tingkat SLTP (usia 13-15 tahun) angkanya belum memenuhi harapan bahkan cenderung menurun untuk APM-nya. Sedangkan untuk APK SD (usia 7-12 tahun) dan SLTP (usia 13-15 tahun) di atas 100 memungkinkan karena banyak anak yang berumur 5-6 tahun sudah masuk SD dan umur 11 – 12 tahun yang sudah masuk SLTP. Program-program pemerintah yang strategis ini dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat dalam menikmati layanan pendidikan yang dibutuhkan, sehingga anak-anak usia sekolah dapat bersekolah sesuai dengan layanan yang diberikan. Program strategis itu antara lain, Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SD/MI dan SMP/MTs dan Program Sekolah Gratis di Kabupaten Rembang pada jenjang Pendidikan Dasar.

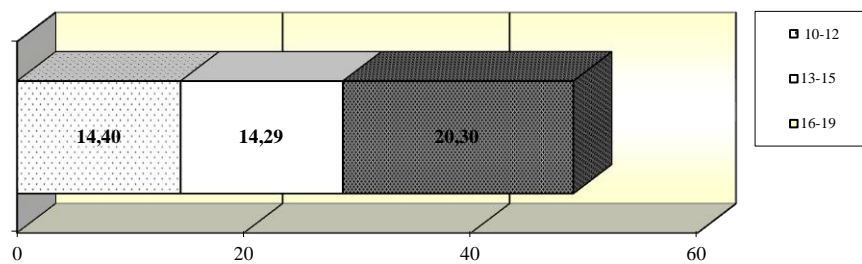
Selanjutnya hal lain yang perlu diperhatikan adalah masalah pekerja anak yang semakin merembak dan kondisi ini tidak bisa dilarang, namun demikian berilah mereka kesempatan atau waktu untuk belajar di sekolah atau kegiatan lain yang seharusnya dapat mereka nikmati. Kemungkinan terjadinya pekerja anak memang dikehendaki oleh masyarakat atau orang tuanya yang berkaitan dengan usaha melestarikan keahlian atau kemampuan yang sekaligus mendidik mereka agar bisa belajar dan mempunyai motivasi bekerja. Dengan cara

tersebut, orang tua bisa menanamkan rasa kebersamaan dan tanggung jawab sejak dini yang berguna di masa mendatang. Apa jadinya bila keluarga nelayan atau petani baru melibatkan anaknya untuk bekerja atau membantu pekerjaan orang tuanya setelah mereka dewasa. Gambaran ketenagakerjaan AUS (7-15 tahun) dapat dijadikan masukan untuk menyusun rencana dan kebijakan yang lebih baik dalam rangka menindaklanjuti program wajar diksar 9 tahun.

Selanjutnya kondisi krisis ekonomi yang sampai saat ini masih terjadi di daerah, tidak tertutup kemungkinan menimbulkan dampak sosial yang serius jika tidak dilakukan tindakan preventif. Merebaknya anak jalanan yang menjurus pada tindakan kriminal dan penyalahgunaan obat-obat terlarang (napza) semakin banyak bermunculan di banyak daerah. Walaupun masalah ini tidak/ belum terjadi secara terbuka di Kabupaten Rembang namun tetap diperlukan tindakan antisipasi. Data yang diperoleh dari dinas sosial Kabupaten Rembang tahun 2013, menyebutkan bahwa jumlah anak terlantar tercatat 2.855 anak (terbanyak berada di kecamatan Kragan sebanyak 819 anak), anak jalanan tercatat 51 (terbanyak di kecamatan Lasem sebanyak 36 anak) dan anak nakal tercatat 179 anak (terbanyak di kecamatan Pamotan sebanyak 135 anak) . Untuk itu, diperlukan perhatian dan kebijakan pemerintah diikuti tindakan yang terpadu dari semua pihak untuk dapat menciptakan suasana Kabupaten Rembang yang aman dan terhindar dari degradasi sosial yang lebih parah.

2.2.3. Anak dan Remaja Wanita (10-19 Tahun)

Jumlah penduduk anak dan remaja wanita berumur 10-19 tahun di Kabupaten Rembang tahun 2013 tercatat sebanyak 48.976 jiwa dengan rincian remaja wanita (16-19 tahun) sekitar 20.300 jiwa atau 41,45 %. Variasi angka untuk kelompok sasaran ini berkisar antara 1.653 jiwa (Kec.Gunem) dan 7.010 jiwa (Kec.Rembang).

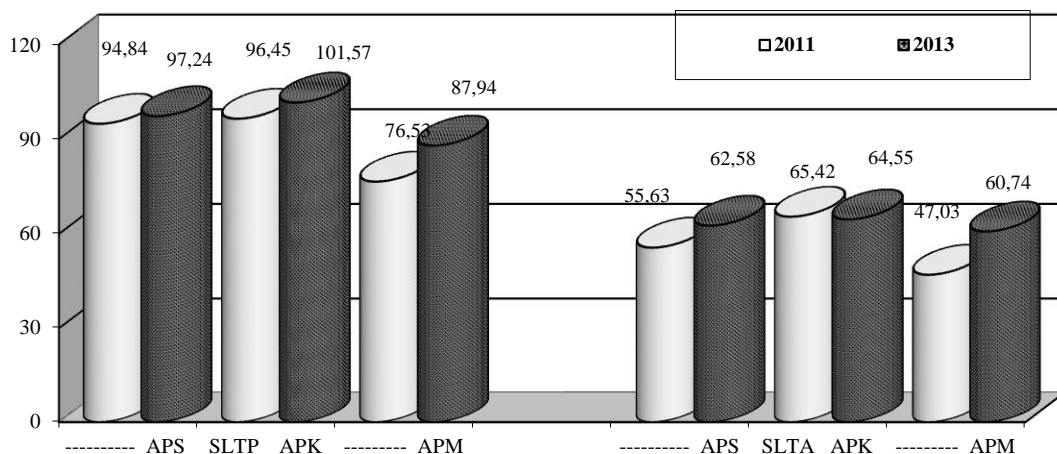


Gambar 2.4 Jumlah penduduk anak dan remaja wanita 10-19 thn (ribuan jiwa)

Kelompok anak dan remaja wanita usia ini memainkan peran yang penting, yaitu peran kodrati dan peran gender sekaligus, karena mereka baik yang sekolah maupun yang sudah tidak sekolah menjadi tumpuan keluarga untuk melakukan kegiatan/pekerjaan domestik berkaitan dengan kerumah tanggaan. Sebagian besar mereka ada di luar sekolah, masuk dalam bursa tenaga kerja baik formal maupun non formal sehingga mereka berada dalam kondisi beban ganda antara pekerjaan produktif dan domestik.

Kondisi yang diterima oleh anak-anak dari lingkungan keluarga pada saat tumbuh-kembangnya akan memberi dampak yang besar dalam perilaku mereka dikemudian hari dalam menyikapi masalah gender. Dengan demikian, perberdaan perlakuan gender akan berhasil jika sejak dini persamaan hak dan kewajiban setiap individu dimulai dari rumah tangga. Untuk itu, perlu adanya bimbingan dan penyuluhan kepada semua lapisan masyarakat berkaitan dengan masalah gender sehingga upaya untuk menciptakan kesetaraan gender bisa tercapai.

Sebagian besar mereka tercatat masih sekolah dengan angka sekitar 81,17 % dengan rincian tingkat SD sebanyak 28,51 %, SLTP ada 29,76 % dan SLTA tercatat sebanyak 22,90 %. Mereka yang sudah tidak sekolah lagi yang tercatat sebanyak 17,86 %. Secara umum indikator pendidikan untuk kelompok sasaran ini (wanita usia 10-19 tahun) pada tahun 2013 untuk tingkat SLTP maupun SLTA menunjukkan adanya kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2011, sebagai terlihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.5 Angka partisipasi pendidikan anak dan remaja wanita (10-19 thn)

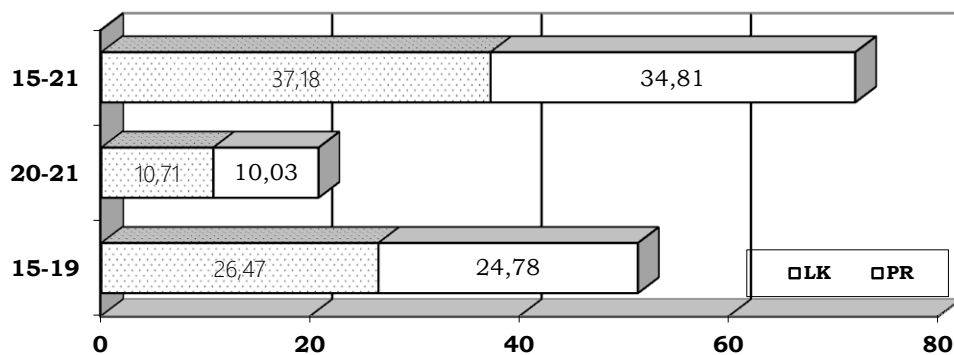
Kondisi ini mencerminkan bahwa ada perubahan pola pikir dan perhatian orang tua yang mengarah terjadinya peningkatan kualitas pendidikan anak/remaja wanita dengan jalan menyekolahkan ke jenjang lebih tinggi (SLTA) setelah mereka lulus dari SLTP, sedangkan untuk tingkat SLTP tidak ada perubahan sebagaimana yang telah diuraikan pada AUS 7-15 tahun. Produk kegiatan dan kebijakan pendidikan biasanya dilihat dalam jangka panjang yang ditunjukkan dari tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk yang bersangkutan. Sebagian besar penduduk pada kelompok ini berpendidikan SD ke bawah yang mencapai angka mencapai 62,69 % dan diantaranya ada sebanyak 29,83 % yang belum/tidak tamat SD. Mereka yang tamat SLTP dan SLTA ke atas, masing-masing hanya sebesar 30,25 % dan 7,06 % saja.

Selanjutnya dari sisi ketenagakerjaan ternyata kelompok anak/remaja wanita ada sekitar 4.212 orang atau 8,60 % yang berstatus sebagai pekerja dengan lapangan pekerjaan terbanyak adalah sektor perdagangan (56,57 %) diikuti sektor jasa sebesar 26,51 % dan sektor industri sebesar 12,60 %. Mereka lebih banyak bekerja sebagai pekerja keluarga tercatat sebesar 55,47 % dan yang sebagai buruh/karyawan sebesar 26,51 %, dengan jam kerja terbanyak di diatas 35 jam seminggu yang tercatat sebesar 40,72 % dan pekerja wanita dengan jam kerja kurang dari 15 jam seminggu sebesar 26,29 %. Angka TPAK dan TPT

untuk kelompok anak/remaja wanita usia 10-19 tahun di Kabupaten.Rembang tahun 2013 tercatat sebesar 8,80 % dan 2,81 %.

2.2.4. Remaja Wanita dan Pria (15-21 Tahun)

Jumlah penduduk remaja usia 15-21 tahun di Kabupaten Rembang tahun 2013 tercatat sebanyak 71.997 jiwa atau 11,77 % dari jumlah penduduk ada dengan rincian penduduk wanita sekitar 37.184 jiwa atau angka sex ratio sekitar 106,81 per 100 penduduk wanita. Proporsi penduduk laki-laki terhadap total penduduk laki-laki tercatat sekitar 12,20 % dan untuk penduduk wanita angkanya sebesar 11,35 %.

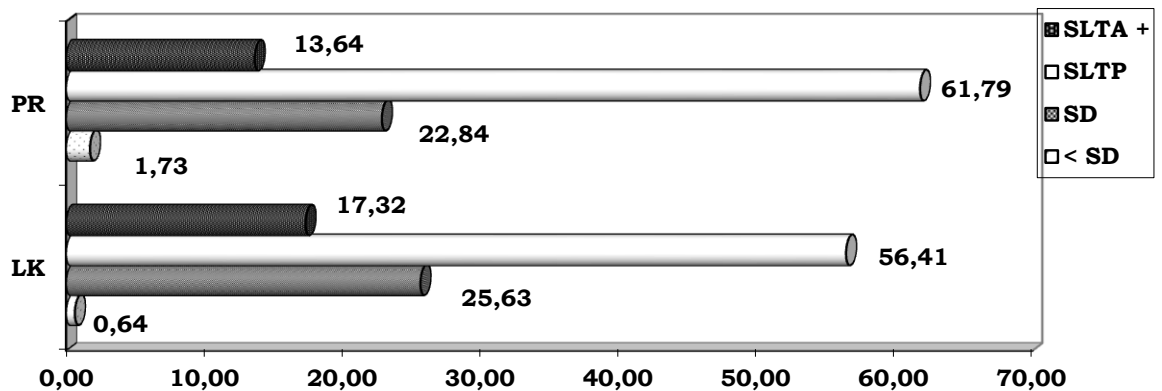


**Gambar 2.6 Jumlah Penduduk Usia 15-21 Tahun
(ribuan jiwa)**

Kelompok remaja ini, dapat dibagi dalam dua bagian yaitu mereka yang ada pada lembaga pendidikan (SLTP sampai dengan Perguruan Tinggi) dan yang lain berada di luar lembaga pendidikan yang karena sesuatu sebab tidak dapat sekolah lagi karena tidak mampu alasan ekonomi, intelegensi ataupun motivasi yang rendah. Alternatif yang biasanya diambil oleh kelompok yang terakhir adalah memasuki pasar tenaga kerja baik di sektor formal maupun non formal. Keingintahuan kaum remaja yang tinggi akan sesuatu hal yang baru dan kecenderungan masih labil pada usia ini menyebabkan mereka melakukan upaya 'coba-coba' ingin merasakan, mengalami dan melihat sendiri baik hal positif maupun negatif. Untuk itu, kaum merupakan kelompok yang rentan terhadap pengaruh lingkungan yang buruk seperti penggunaan obat terlarang dan hubungan seks secara bebas.

Secara umum, tingkat pendidikan yang ditamatkan untuk kelompok sasaran ini di Kabupaten Rembang relatif rendah, mereka masih berpendidikan SD ke bawah yang tercatat sebesar 30 %. Rendahnya tingkat pendidikan tersebut kemungkinan karena pengaruh lingkungan tempat tinggal terutama di desa-desa nelayan. Pengaruh lingkungan tersebut antara lain berupa dorongan untuk kerja sebagai nelayan (ABK = anak buah kapal) sehingga timbul kecenderungan mereka lebih suka mencari uang dari pada sekolah.

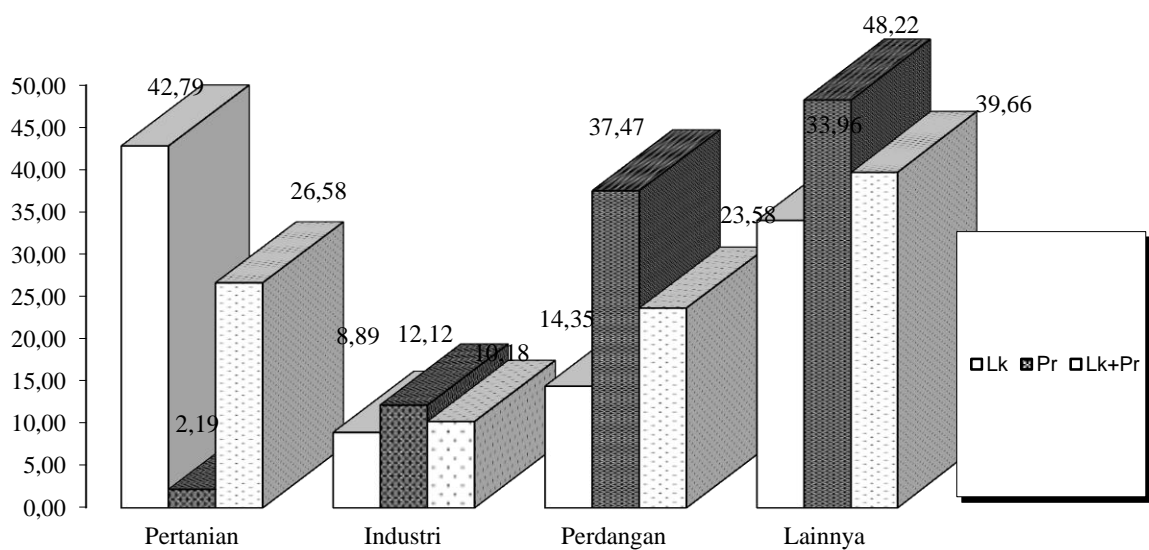
Tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk usia 15-21 tahun di Kab. Rembang secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.7 Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Penduduk Usia 15-21 tahun

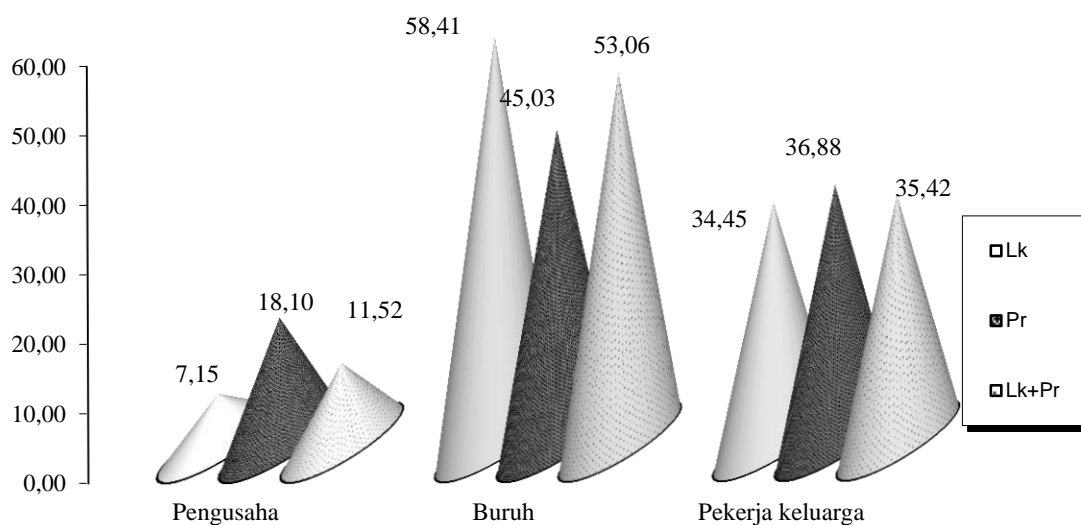
Usia kawin pertama bagi kaum wanita di Kabupaten Rembang cenderung naik dari tahun ke tahun walaupun masih terdapat mereka yang menikah di bawah usia 17 tahun. Peristiwa nikah usia anak yang tercatat di KUA Kabupaten Rembang tahun 2013 tercatat sebanyak 26 kejadian. Keberhasilan ini merupakan buah dari kerja keras yang dilakukan oleh pemerintah dan mendapat dukungan luas dari masyarakat dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dengan jalan/cara penundaan usia kawin pertama bagi wanita dan menekan jumlah rumah tangga baru yang berpotensi miskin. Kondisi ini memberi pengaruh kepada remaja wanita untuk menggunakan waktu luang untuk mencari pengetahuan dan ketrampilan ataupun bekerja.

Angka TPAK untuk kelompok sasaran ini sebesar 37,19 %, dengan rincian TPAK laki-laki tercatat sebesar 51,37 % dan TPAK wanita sebesar 24,40 %. Sedangkan angka TPT masing-masing tercatat sebesar 16,94 % untuk laki-laki dan 11,59 % untuk perempuan dimana TPT totalnya sebesar 14,88 %. Untuk laki-laki sebagian besar mereka bekerja di sektor pertanian sebesar 42,79 % sedangkan untuk pekerja wanita di sektor perdagangan sebesar 37,47 %. Keadaan ketenagakerjaan lebih rinci berkaitan dengan lapangan usaha, status pekerja dan jam kerja seminggu pada kelompok remaja usia 15-21 tahun, terangkum pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.8 Tenaga Kerja Penduduk Usia 15-21 tahun menurut Lapangan Pekerjaan

Gambar 2.9 berikut menunjukkan bahwa penduduk usia 15-21 tahun lebih banyak menjadi buruh yaitu sebesar 53,06% dan menjadi pekerja keluarga sebanyak 35,42%, hanya 11,52 % yang bekerja sebagai buruh.



Gambar 2.9 Tenaga Kerja Penduduk Usia 15-21 thn menurut Status Pekerjaan

Secara umum perkembangan kondisi Situasi Hak Anak dari tahun 2013 sampai 2014 seperti tersaji pada tabel 2.17 berikut :

Tabel 2.17

ASHA Kabupaten Rembang Tahun 2013-2014

NO	URAIAN	JUMLAH	
		2013	2014
1	Korban Kekerasan terhadap anak (anak)	14	20
2	Jml Anak Berhadapan dengan hukum yang diselesaikan dengan Restoratif Justice (%)	80	50
3	Angka Kematian Bayi (kasus)	153	125
4	Prevalensi kekurangan gizi pada balita (%)	9,55	9,50
5	Persentase bayi mendapatkan ASI Eksklusif (%)	60,22	80,95
6	Presentase imunisasi dasar lengkap (%)	99,66	100
7	Jumlah PUS (jiwa)	132.754	134.850
8	Peserta KB Suntik (jiwa)	73.551	75.146
9	Peserta KB Pil (jiwa)	22.417	22.766

NO	URAIAN	JUMLAH	
		2013	2014
10	Peserta KB Susuk (jiwa)	8.627	9.418
11	Peserta KB MOP (jiwa)	450	411
12	Peserta KB MOW (jiwa)	2.285	2.358
13	Peserta KB IUD (jiwa)	1.863	2.193
14	AKI (kasus)	11	11

Sumber : BPMPK Kab Rembang Tahun 2014

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa ada peningkatan kasus kekerasan terhadap anak. Pada tahun 2013 sebanyak 14 anak menjadi korban kekerasan dan meningkat menjadi 20 anak pada tahun 2014. Jumlah anak berhadapan dengan hukum yang diselesaikan dengan *restoratif justice* mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2013 sebesar 80% dan turun menjadi 50% pada tahun 2014. Demikian pula terjadi penurunan angka kematian bayi pada tahun 2014 dan kasus prevalensi kekurangan gizi pada balita tahun 2013 9,55 % pada tahun 2014 menurun menjadi 9,50%.

2.2.5. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

Anak berkebutuhan khusus adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyebutkan anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya namun tanpa menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi atau fisiknya. Istilah lain bagi anak berkebutuhan khusus adalah anak luar biasa dan anak cacat. Karena karakteristik dan hambatan yang dimilikinya, anak berkebutuhan khusus (ABK) memerlukan bentuk pelayanan pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensi mereka, contohnya bagi tunanetra mereka memerlukan modifikasi teks bacaan menjadi tulisan Braille dan tunarungu berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Jika pada waktu-waktu sebelumnya, pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus disebut sebagai Sekolah Luar Biasa (SLB), namun beberapa tahun ini, pemerintah telah memperkenalkan sebuah konsep pendidikan yang tidak diskriminatif terhadap anak-anak yang berkebutuhan khusus ini yang disebut dengan sekolah inklusi. Hasil

pendataan anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Rembang yang dilakukan PKK dari desa, RT maupun dawis pada tahun 2015 adalah sebanyak 388 anak berkebutuhan khusus yang tersebar di 14 Kecamatan, seperti tersaji pada tabel 2.18 berikut:

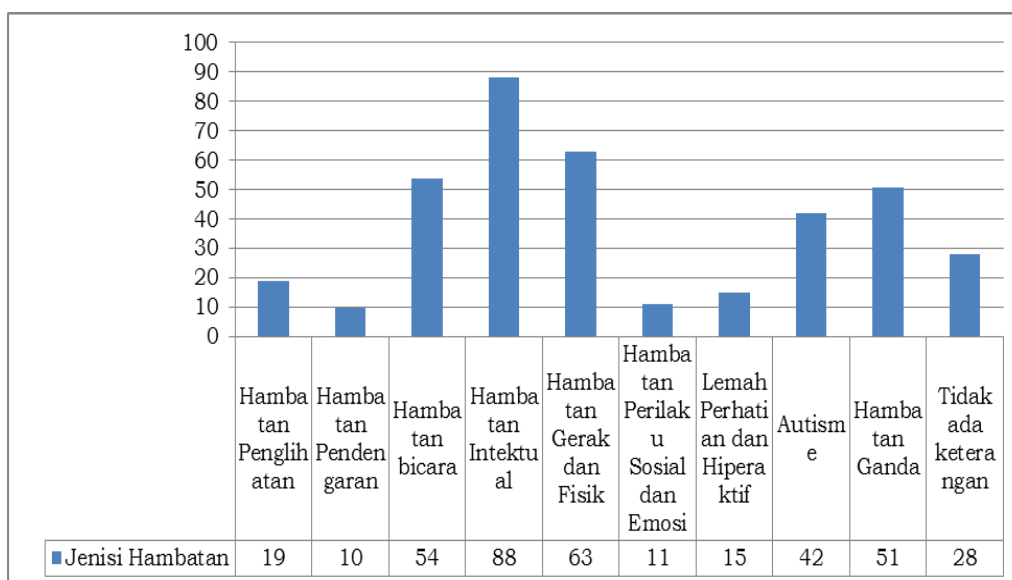
Tabel 2.18
Data Anak Berkebutuhan Khusus yang belum bersekolah
Tahun 2015

NO	KECAMATAN	JML ABK
1	Kaliori	20
2	Pancur	21
3	Pamotan	43
4	Sedan	59
5	Sale	24
6	Sulang	24
7	Kragan	43
8	Bulu	23
9	Sluke	9
10	Lasem	28
11	Sumber	16
12	Rembang	28
13	Gunem	25
14	Sarang	25
	Total	388

Sumber : PKK Kabupaten Rembang, 2015

Dari tabel diatas diketahui bahwa kecamatan dengan jumlah ABK paling banyak adalah Kecamatan Sedan, angkanya mencapai 15,20% atau 59 anak dari total seluruh ABK, kemudian Pamotan dan kragan masing-masing 11 % (43 anak), Kecamatan Lasem ada 28 anak atau 7%. Ada 7 kategori hambatan dalam pendataan yang dilakukan yaitu: hambatan penglihatan, hambatan pendengaran dan bicara, hambatan intelektual, hambatan gerak dan fisik, hambatan perilaku sosial dan emosi, lemah perhatian dan hiperaktivitas dan autisme. Berdasarkan hasil pendataan, hambatan yang dialami oleh ABK di

Kabupaten Rembang paling banyak adalah hambatan intelektual ada 88 anak, disusul hambatan gerak dan fisik 63 anak, hambatan bicara 54 anak, hambatan ganda 51 anak, autisme ada 42 anak, hambatan penglihatan ada 19 anak, hambatan pendengaran 10 anak, serta lemah perhatian dan hiperaktivitas 15 anak, hambatan perilaku sosial dan emosi 11 anak, sedangkan 28 anak tidak ada keterangan ketunaannya. Sebagai catatan perlu diketahui bersama bahwa banyak diantara ABK yang mempunyai hambatan berganda, yaitu lebih dari 1 hambatan misalnya hambatan intelektual bersama dengan lemahnya perhatian dan hiperaktivitas dsb sejumlah 51 anak. Berikut adalah data jumlah ABK berdasarkan jenis hambatan:



Gambar 2.10 Jenis hambatan Anak Berkebutuhan Khusus di Kabupaten Rembang Tahun 2015

Terkait dengan perolehan hak untuk memperoleh pendidikan, data yang disajikan diatas merupakan data anak berkebutuhan khusus usia sekolah (0-18 tahun) yang belum sekolah.

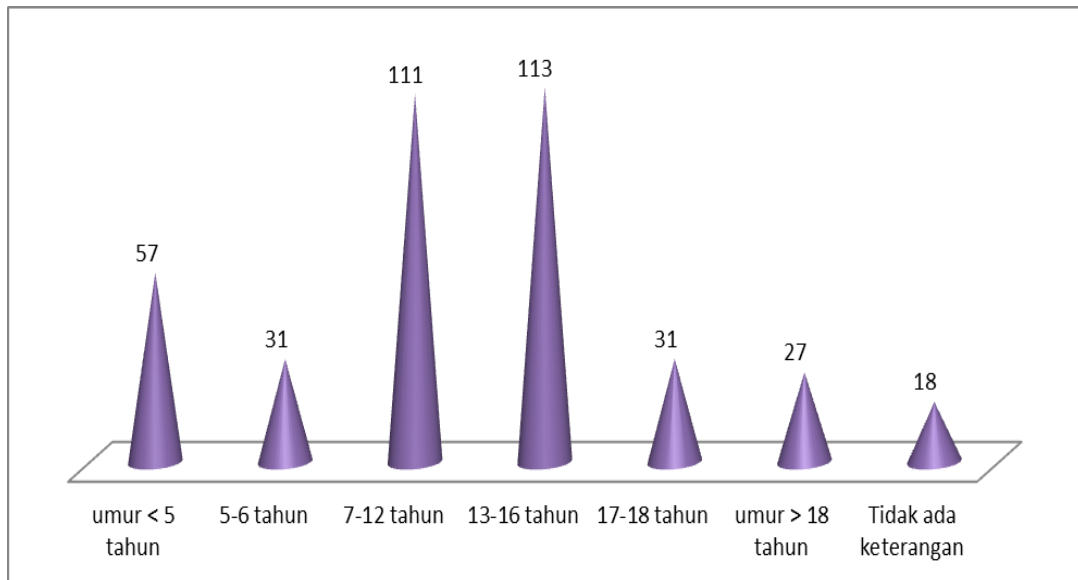
Pendataan ABK di Kabupaten Rembang dilakukan berdasarkan dengan menggolongkan ABK dalam 6 kategori usia yaitu:

- (1) kurang dari 5 th,
- (2) antara 5 -6 th,
- (3) 7-12 th,
- (4) 13-16 th,

(5) 17 - 18 th dan

(6) diatas 18 th.

Gambar dibawah ini menunjukkan jumlah ABK di Kabupaten Rembang tahun 2015 berdasarkan kategori usia.



Gambar 2.11 Jumlah ABK berdasarkan kategori usia

Berdasarkan grafik diatas, usia ABK paling banyak adalah 13-16 tahun yaitu sebanyak 113 orang, kemudian usia 7-12 tahun ada 111 orang. Jumlah terendah yaitu 27 orang berusia lebih dari 18 tahun, sedangkan 18 ABK tidak ada keterangan. Kondisi keluarga yang mempunyai anak ABK menurut hasil pendataan sebagian besar adalah keluarga yang kurang mampu penghasilan mereka kurang dari Rp.750.000 per bulan dengan mata pencaharian sebagian besar pekerjaan adalah petani dan pekerja lepas dan tingkat pendidikan orang tua baik ayah maupun ibu adalah SD.